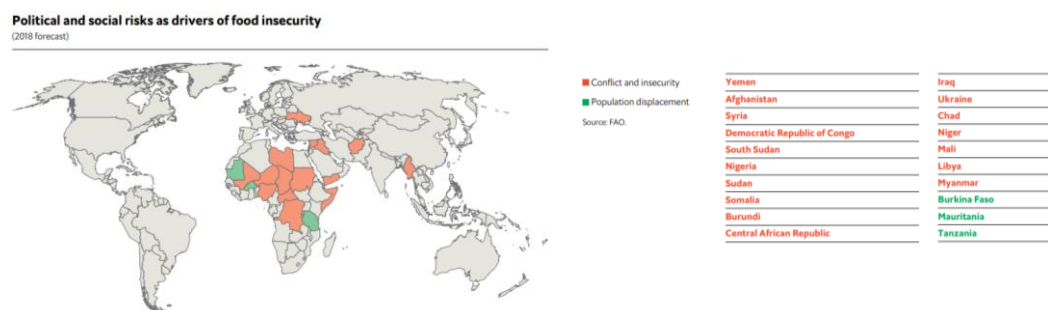


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang bersifat fundamental untuk setiap manusia (Dewanti, 2018, 102). Hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Roma pada tahun 1996 yang menekankan bahwa akses terhadap makanan atau pangan yang layak dan bergizi merupakan hak setiap manusia. Maka dari itu, manusia memiliki hak atas ketercukupan pangan dan hak mendasar untuk hidup dengan bebas tanpa bencana kelaparan (FAO, 1996). Namun pada kenyataannya, kerawanan pangan masih menjadi permasalahan serius di beberapa negara yang dilanda konflik berkepanjangan maupun kekeringan. Isu kerawanan pangan memerlukan penanggulangan bersama dengan berbagai negara di dunia (Putri & Hakiki, 2022, 317).



Gambar 1.1 Index pendorong kerawanan pangan berdasarkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Sumber: *Global Food Security Index in 2018* (The Economist Intelligence Unit, 2018)

Apabila ditinjau dari *Global Food Security Index*, Sudan merupakan salah satu negara yang terkena kerawanan pangan berdasarkan ketidakstabilan politik dan sosial yang ada di negara tersebut. Sudan berada di wilayah Afrika Timur Laut atau *Northeast Africa* yang kerap kali dilanda konflik antar etnis maupun konflik bersenjata (Deldiya & Fachri, 2017). Sudan juga merupakan wilayah bekas pendudukan Inggris yang memiliki keragaman ras, agama, dan suku. Namun, keragaman tersebut gagal untuk dijaga sehingga menimbulkan banyaknya konflik di negara tersebut (Levy et al., 2017).

Salah satu konflik antar etnis di Sudan terjadi di daerah Darfur yang pecah sejak awal tahun 2003 dengan beberapa masalah pemicunya, yakni adanya pembatasan ekonomi dan politik oleh pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, perampasan sumber daya alam, serta distribusi kekuasaan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut semakin memburuk disebabkan oleh aksi pemberontakan bersenjata oleh *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) (The International Commission of Inquiry for Darfur, 2005). Konflik ini berakhir setelah adanya perjanjian damai yang difasilitasi oleh Qatar antara Pemerintah Khartoum dan Pemberontak Sudan melalui *the Doha Document for Peace in Darfur* (DDPD) (UNAMID, 2011).

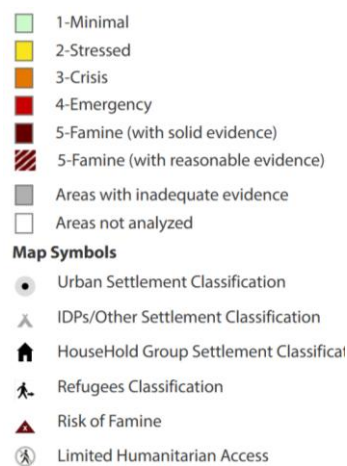
Pada April 2023, terdapat perang saudara di Sudan disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara *Rapid Support Force* (RSF) dan *Sudanese Armed Forces* (SAF) (Kompas TV, 2024). Menurut laporan *United Nations* (UN) pada Oktober 2024, perang tersebut menyebabkan 25 juta orang memerlukan bantuan

kemanusiaan. Selain itu, terdapat lebih dari 750.000 penduduk Sudan yang mengalami kerawanan pangan akut (UN, 2024).

Dalam mengatasi permasalahan ini, terdapat Organisasi Internasional (OI) yang memberikan partisipasi aktifnya dalam permasalahan kerawanan pangan, seperti WFP, *Food and Agriculture Organization* (FAO), dll. WFP merupakan OI dibawah naungan UN yang berkecimpung dalam permasalahan kemanusiaan dan bertujuan untuk menolong atau menyelamatkan manusia dalam kondisi darurat. WFP menyalurkan bantuan makanan untuk menciptakan landasan bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi orang-orang yang sedang memulihkan diri dari dampak konflik, tantangan perubahan iklim, dan bencana alam (WFP, 2024). WFP berupaya memperbaiki gizi para perempuan dan anak-anak, memberikan dorongan terhadap petani kecil dalam rangka mengembangkan produktivitas, menurunkan tingkat kehilangan hasil panen, serta memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan program penyediaan pangan di sekolah (WFP, 2024).

WFP memiliki program yang bernama *Country Strategic Plan* (CSP) yang diciptakan untuk memastikan bahwa arah dan WFP dalam aktivitas kemanusiaan dan kegiatan pembangunan di level negara (UN, 2020). Salah satu negara yang mendapatkan program CSP adalah Sudan. WFP menjalankan CSP di Sudan dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan yang sedang terjadi akibat konflik berkepanjangan, krisis ekonomi, perubahan iklim ekstrim, merebaknya wabah penyakit, dan pengungsian (WFP, 2019). Program CSP terdiri dari berbagai elemen strategis yang disusun setelah melakukan konsultasi yang

mendalam dengan Pemerintah Sudan, badan UN, donor, dan mitra kerja sama yang ada di wilayah Sudan. Dalam implementasi program CSP, WFP bekerja sama dengan berbagai kementerian di Sudan, seperti kementerian pendidikan, kesehatan, pertanian dan kehutanan, serta kementerian keamanan dan pembangunan sosial untuk memastikan program berjalan dengan baik (WFP Executive Board, 2018).



Gambar 1.2 *Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Scale*

Sumber: IPC (IPC, 2025)

Tabel 1.1 *Integrated Food Security Phase Classification (IPC) in Sudan 2020-2024*

		Klasifikasi Populasi Terdampak				
Tahun	Bulan	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
2021	Okt-Des	20.507.606	17.407.791	5.800.371	1.296.808	0
2021	Apr-Mei	24.459.653	14.810.899	5.457.113	1.841.160	0
	Jun-Sep	20.237.468	16.525.736	7.072.838	2.696.783	0
2021-2022	Okt-Feb	25.605.121	15.007.696	4.631.480	1.324.529	0
2022	Apr-Mei	21.304.978	16.883.102	7.325.932	2.321.662	0

	Jun-Sep	18.622.392	17.575.637	8.549.970	3.103.098	
2022-2023	Okt-Feb	22.371.931	17.746.553	6.189.076	1.549.705	0
2023	Juni	13.593.729	18.069.983	12.038.785	4.877.214	0
	Jul-Sep	11.194.025	17.092.334	14.037.556	6.255.796	0
2023-2024	Okt-Feb	14.254.063	19.348.952	11.153.161	3.823.536	0
2024	Apr-Mei	9.036.411	16.859.767	14.603.918	6.554.877	153.152
	Jun-Sep	6.426.647	15.184.078	16.309.134	8.533.005	755.262
	Okt-Nov	7.388.526	15.622.067	15.894.224	8.098.590	525.029

Sumber: Data ini diolah oleh penulis dari IPC (IPC, 2025)

Apabila ditinjau dari laporan IPC pada tahun 2020, terdapat 1.296.808 masyarakat Sudan yang berada di *phase 4* atau *phase emergency*. Meskipun tidak terdapat masyarakat yang masuk dalam *phase 5* atau *famine*, data yang ada menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang mengalami kerawanan pangan di sejumlah wilayah di Sudan, khususnya di wilayah Shamal Jabal Marrah. Jumlah populasi yang terdampak *phase 3* keatas terus mengalami perubahan, tetapi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2024 mulai terdapat masyarakat yang masuk dalam skala *phase 5* atau *famine* (IPC, 2025).

Pada tahun 2024, terdapat kenaikan angka kerawanan pangan yang ada di Sudan. Terdapat 8.098.590 masyarakat Sudan yang berada di *phase 4 emergency* menurut *IPC scale*. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan masyarakat pada skala *emergency* sebesar 524,5% dibandingkan tahun 2020. Masyarakat

Sudan tidak hanya berada pada *phase 4 emergency*, tetapi juga terdapat sejumlah masyarakat yang masuk dalam *phase 5 famine*. Tepatnya terdapat 525.029 masyarakat yang berada pada *phase* tertinggi dari skala yang dikeluarkan oleh IPC (IPC, 2025).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IPC, memperlihatkan bahwa tingkat kerawanan pangan yang ada di Sudan mengalami perubahan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun pada tahun 2024, terdapat masyarakat Sudan yang mengalami *famine* atau kelaparan ekstrim. Kompleksitas permasalahan yang ada di Sudan, yakni konflik berkepanjangan, krisis ekonomi, perubahan iklim ekstrim, epidemi, dan gelombang pengungsian menjadikan implementasi WFP dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan penting untuk dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana implementasi WFP melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024.

Penulis melakukan tinjauan literatur untuk menghindari *lack of familiarity* (Purbantina & Perbawani, 2023). Elin Dewanti (2018) dalam tulisannya berjudul "Peranan World Food Programme (WFP) Melalui Program Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)" menggunakan konsep hubungan internasional, OI, dan isu keamanan non-tradisional untuk menganalisa peran WFP di NTB. Penelitian tersebut bertujuan melihat peranan WFP mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui *Programme Food Asset*. Dewanti melakukan wawancara dengan karyawan perwakilan dari WFP dan Badan Ketahanan NTB

sebagai data primer dan melakukan tinjauan pustaka dari berbagai literatur sebagai data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam tulisannya, Dewanti menemukan bahwa WFP telah berperan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan ketahanan pangan, melakukan *monitoring*, *long-term evaluation*, memberikan bantuan logistik dan pendanaan (Dewanti, 2018).

Putri, Oktaviani, dan Nulhaqim (2022) dalam tulisan artikel jurnalnya berjudul “Upaya Organisasi Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Yaman” berusaha mendeskripsikan upaya OI dalam mengatasi *humanity issue* di Yaman. Penulis menggunakan konsep upaya OI oleh Luerdi dan Mardiyanti (2021), konsep OI dalam sistem internasional oleh Perwita dan Yani (2014), dan krisis pangan oleh Norjali (2017) untuk menganalisa masalah kemanusiaan di Yaman. Penulis menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur dalam mengumpulkan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam penelitiannya yang memiliki tipe penelitian deskriptif. Penulis menemukan bahwa *Food Agriculture Organization* (FAO) telah memberikan bantuan bagi penduduk rentan akibat naiknya harga pangan, serta WFP yang telah memberikan bantuan makan, tunai, nutrisi, dan memfasilitasi secara logistik. Penulis menyimpulkan bahwa dalam mengatasi masalah kemanusiaan di Yaman, berbagai OI, seperti FAO, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan WFP telah memberikan berbagai pasokan bantuan yang membuahkan hasil (Putri et al., 2022).

Anggraeni dan Rasyidah (2024) dalam penelitiannya berjudul *Implementation of the Country Strategic Plan (CSP) by the World Food Program*

(WFP) for Pakistan in 2018 – 2022: Management Approach-Based Analysis bertujuan untuk melihat bagaimana WFP mengimplementasikan upayanya dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Pakistan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan konsep pendekatan manajerial dalam implementasi OI oleh Joachim, Reinalda, and Verbeek (2008). Anggraeni dan Rasyidah (2024) menemukan bahwa melalui program *Country Strategic Plan* (CSP) WFP telah mengimplementasikan sistem *monitoring* yang komprehensif, termasuk pelaporan internal, eksternal, dan internal dari WFP Pakistan. Terdapat partisipasi dari pemangku kepentingan yang difasilitasi lewat kolaborasi dengan IGOs dan *Non-Governmental Organization* (NGOs) yang lain. Berbagai inisiatif *capacity building* dan dukungan kemanusiaan telah diterapkan serta disalurkan melalui program CSP, yang merefleksikan sasaran utamanya (Anggraeni & Rasyidah, 2024).

Berdasarkan akumulasi paparan latar belakang masalah dan tinjauan literatur, peneliti menemukan *gap* penelitian sebelumnya berupa implementasi WFP melalui “The Country Strategic Plan” di Sudan yang belum membahas menggunakan konsep *food insecurity* dan pendekatan manajerial dalam implementasi OI yang peneliti terapkan dalam rumusan masalah *paper* ini. Selain itu, penulis juga menemukan jangkauan penelitian CSP di Sudan dalam kurun waktu 2019-2024 yang belum dibahas pada jurnal terdahulu. Jurnal sebelumnya membahas tentang WFP telah berperan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan ketahanan pangan, melakukan *monitoring*, *capacity building*,

long-term evaluation, humanitarian assistance, stakeholder engagement memberikan bantuan logistik, bantuan materil, dan nonmateril.

Dalam jurnal terdahulu, FAO, UNICEF, dan WFP telah memberikan berbagai pasokan bantuan, dan upaya untuk membangun ketangguhan di Sudan justru dapat memperpanjang krisis. Beberapa jurnal tersebut peneliti jadikan acuan untuk mengembangkan penelitian terbaru tentang implementasi WFP dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada di Sudan. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis implementasi WFP melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana implementasi WFP melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata 1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi yang dilakukan oleh WFP melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" dalam rangka mengatasi kerawanan pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024. Analisis

tersebut disusun berdasarkan penerapan konsep kerawanan pangan dan pendekatan manajerial dalam implementasi OI.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Food Insecurity

Food insecurity atau kerawanan pangan merupakan suatu bentuk ancaman bagi manusia dan sistem internasional. Seorang manusia dapat dikatakan berada dalam kondisi yang tidak aman apabila ia tidak mempunyai jaminan untuk memperoleh pangan maupun memiliki kebebasan untuk menumbuhkan dan menyimpannya (Lima & Costantino, 2021). Kerawanan pangan dapat dipicu oleh beberapa faktor utama, yakni perubahan iklim, bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik bersenjata, yang semuanya secara tak terhindarkan menimbulkan adanya migrasi paksa. Selanjutnya, adanya perpaduan antara konflik bersenjata dan perubahan iklim dapat memperparah kondisi kerawanan pangan yang ada (Iriti & Vitalini, 2024).

Konflik yang terjadi di suatu wilayah dapat menghancurkan budidaya tanaman, pemeliharaan ternak, dan panen. Konflik juga dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya pedesaan serta mengacaukan sistem transportasi dan penyaluran pangan. Selanjutnya, konflik dapat berdampak pada ketahanan pangan yang mampu berlanjut dalam jangka waktu yang panjang setelah konflik berakhir. Meskipun kerusakan terjadi dalam jangka waktu yang cepat, tetapi proses rekonstruksi akan memerlukan banyak waktu. Proses rekonstruksi yang terjadi

juga memerlukan usaha, manusia, sumber daya material, dan keuangan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik (Lima & Costantino, 2021).

1.4.2 Implementasi Organisasi Internasional

Dalam buku berjudul “International Organization and Implementation,” Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek mengemukakan bahwa pada era ini, keberadaan Organisasi Internasional (OI) semakin meluas sehingga hampir semua aspek kebijakan dalam ranah global memiliki partisipasi OI. Selain itu, perkembangan implementasi Organisasi Internasional (OI) dalam tatanan dunia memiliki kaitan erat dengan munculnya globalisasi dan pada saat berakhirnya perang dingin. Implementasi merujuk pada pelaksanaan kebijakan berupa pemberlakuan peraturan perundang-undangan, penegakan aturan hukum, atau pendirian institusi (Joachim et al., 2007).

Seiring dengan berjalannya masa dan perkembangan tatanan dunia, OI turut mengalami transformasi. OI yang semula hanya sebagai perwakilan dari suatu negara atau suatu forum tempat negara-negara bertemu, tetapi saat ini dianggap sebagai aktor. Para aktor ini memegang peranan penting dalam ranah politik global (Joachim et al., 2007). Dalam konsep ini, Joachim, Reinalda, dan Verbeek memaparkan bahwa pada level domestik terdapat tiga pendekatan dalam OI yang terdiri dari *enforcement approach*, *management/managerial approach*, serta *normative approach*. Namun dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan satu elemen yang ada dalam implementasi OI, yaitu *managerial approach* atau pendekatan manajerial. *Managerial approach* digunakan untuk memaparkan dan

mengkaji implementasi yang dilaksanakan oleh OI yang menjadi objek studi (Joachim et al., 2007).

Enforcement approach merupakan pendekatan yang memiliki sifat memaksa. Pendekatan ini memperlihatkan ketaatan pada sebuah perjanjian internasional melalui berbagai cara pemaksaan dengan menerapkan ancaman hukuman sebagai bentuk konsekuensi jika negara yang terlibat tidak taat dan tidak mengimplementasikan isi perjanjian yang disetujui dengan benar dan semestinya. Pada pendekatan ini, negara merupakan aktor rasional yang memperhitungkan berbagai aspek baik biaya maupun keuntungan dari sebuah perjanjian (Joachim et al., 2007).

Management atau *Managerial approach* merupakan suatu pendekatan yang memiliki sifat terbuka dan tidak memaksa. Pendekatan ini mempunyai ciri yakni, penyelesaian masalah, interpretasi dari suatu aturan, dan pengembangan kemampuan atau kapasitas serta adanya transparansi. *Normative approach* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kekuasaan normatif organisasi internasional dalam memberikan pengaruh kepada negara-negara agar tunduk pada perjanjian internasional lewat kewenangan dan legitimasi yang OI miliki. Otoritas atau kewenangan OI mempunyai dua sumber (Joachim et al., 2007).

Sumber pertama, yaitu kendali atas berbagai informasi dan keterampilan. Pengetahuan teknis spesialisasi, training, dan pengalaman khusus mampu membuat organisasi, lembaga-lembaga, atau birokrasi mengimplementasikan instruksi dan perjanjian dengan lebih efektif, serta memberikan mereka kekuasaan terhadap aktor-aktor lainnya yang tidak terlalu mempunyai pengalaman. Sumber

kedua, yakni OI dipandang rasional dan imparial. Hal ini berkaitan dengan regulasi dan mekanisme yang membentuk dasar keberadaan mereka. Berdasarkan pandangan pada pendekatan normatif, OI memakai pertimbangan yang rasional untuk mempengaruhi negara-negara agar mematuhi kesepakatan internasional sebagai hal yang tepat dibandingkan harus memaksa suatu negara (Joachim et al., 2007).

Tabel 1.2 Implementasi Organisasi Internasional

	Enforcement Approach	Management Approach	Normative Approach
<i>Resources</i>	<i>Naming and shaming, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</i>	<i>Monitoring on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</i>	<i>Authority and Legitimacy</i>
	<i>Sanctions, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</i>	<i>Capacity building and problem solving through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</i>	

Sumber: (Joachim et al., 2007)

1.4.2.1 Managerial / Management Approach

Managerial approach atau pendekatan manajerial menganggap bahwa implementasi suatu perjanjian ditentukan oleh adanya interaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini mempunyai ciri yakni, penyelesaian masalah, interpretasi dari suatu aturan, dan pengembangan kemampuan atau kapasitas serta

adanya transparansi daripada memberikan suatu sanksi (Joachim et al., 2007). Selanjutnya, ketika terdapat permasalahan maupun hambatan, maka penyelesaiannya harus diatasi dengan konsultasi dan diskusi, alih-alih dianggap sebagai pelanggaran yang harus diberi hukuman (Chayes & Chayes, 1995).

Pendekatan manajerial menganggap bahwa aktor luar, yakni OI, lembaga birokrasi, dan badan-badannya memiliki peran krusial pada implementasinya karena mereka mempunyai kapabilitas untuk mendukung negara-negara dalam mengembangkan kapasitas guna melaksanakan tindakan yang dibutuhkan. Pada pelaksanaannya, dipaparkan aktor pendukung yang ada di dalam pendekatan ini, yakni aktor negara sasaran, *Non-Governmental Organization* (NGO), badan-badan *United Nations* (UN), partai politik, penduduk sipil, dan media massa. Selain itu, pendekatan ini menganggap bahwa keikutsertaan aktor lain merupakan hal yang krusial untuk mencapai program yang dilaksanakan (Joachim et al., 2007).

Dalam pendekatan manajerial, OI secara umum mempunyai kemampuan khusus, sehingga mampu menyediakan bantuan teknis kepada negara yang membutuhkan. Selain itu, OI juga dapat mengurangi tekanan yang berkaitan dengan implementasi melalui penyediaan bantuan keuangan. Selanjutnya, terdapat dua hal krusial yang diterapkan dalam implementasi, yakni *monitoring* atau pemantauan, *capacity building* atau pengembangan kapasitas dan *problem solving* atau penyelesaian masalah (Joachim et al., 2007).

1.4.2.1.1 Monitoring

Monitoring adalah salah satu elemen dari pendekatan manajerial yang dapat dilaksanakan melalui laporan dari aktor negara yang berkaitan. Selain itu,

monitoring juga dapat dilakukan melalui tinjauan dari *expert committees* atau komite ahli, audit, dan laporan dari NGO. Laporan yang berasal dari aktor negara adalah laporan yang diserahkan oleh negara yang berkaitan dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui perkembangan dari program atau rancangan program yang dilaksanakan. Tinjauan dari pakar ahli adalah analisis yang disediakan oleh pakar penasehat berasal dari organisasi yang telah mendapatkan arahan atau pelatihan teknis dan pendukung dalam berbagai bidang spesifik (Joachim et al., 2007).

Kumpulan pakar ahli dibentuk oleh Jenderal sebagai forum konsultasi khusus dan memberikan rekomendasi teknis terkait topik atau permasalahan yang menjadi perhatian utama (Deshman, 2011). Selain itu, monitoring juga dapat berupa laporan dari NGO yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan program atau perjanjian barangkali terdapat kerja sama OI dengan organisasi regional atau NGO yang berada dalam lingkup program atau perjanjian tersebut (Joachim et al., 2007). Hasil laporan yang didapatkan akan dianalisis dan dibandingkan dengan parameter untuk menentukan sejauh mana perkembangan program yang terlaksana (Hardlife & Zhou, 2013).

Pada level dasar, kegiatan *monitoring* meliputi observasi terhadap tindakan adaptasi dan evaluasi efektivitas, pengaruh, efisiensi, dan kesinambungannya, serta seberapa jauh upaya tersebut mencapai sasaran yang telah ditentukan (Bours et al., 2013). Selanjutnya, data laporan yang di telah dihimpun lewat berbagai aktor akan diproses dengan sasaran indikator keberhasilan. Hasil data laporan yang telah didapatkan akan dikomparasikan dengan program yang dirumuskan dan dikaji

indikator yang berhubungan dengan perkembangan program. Hasil analisis data selanjutnya akan dilaporkan dalam *annual report* atau laporan tahunan (Hardlife & Zhou, 2013).

1.4.2.1.2 *Capacity Building dan Problem Solving*

Capacity building atau pengembangan kapasitas adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kapabilitas individu, kelompok, atau organisasi guna mewujudkan tujuan mereka secara independen, tepat sasaran, efisien, berkelanjutan, serta dapat menyelesaikan isu-isu yang ada (Grindle, 1997). Selanjutnya, *problem solving* adalah proses mendefinisikan persoalan, menetapkan akar penyebabnya, melakukan identifikasi, prioritas, pemilihan solusi, dan implementasi solusi yang dipilih. Organisasi internasional dianggap sebagai aktor yang menjadi bagian dari sistem pemecahan masalah (Dupont & Skjold, 2022). Pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan memperoleh saran dari para pakar, interpretasi peraturan, *financial assistance* atau bantuan keuangan, dan *technical assistance* atau bantuan teknis (Joachim et al., 2007).

OI dalam implementasi programnya menyediakan saran dan dukungan dari para ahli dalam rangka mewujudkan hasil yang maksimal. Sementara itu, *financial assistance* menjadi satu dari beberapa *high agenda* atau agenda krusial yang dimiliki oleh OI. Sistem yang dimiliki oleh bantuan tersebut dirancang untuk mempermudah negara-negara berkembang mengimplementasikannya lewat *financial resources* yang diperoleh dari berbagai saluran, yakni bilateral, regional, dan internasional. *Financial assistance* disalurkan oleh OI lewat beragam langkah,

seperti keselarasan kriteria dan metode pengajuan (Pallemaerts & Armstrong, 2009).

Dalam pengembangan kapasitas dan *problem solving*, terdapat bantuan lain yang dilaksanakan selain bantuan secara finansial, yakni *technical assistance*. Terdapat keterlibatan pemerintah dalam mengimplementasikan *Technical assistance*. Keterlibatan tersebut memberikan hasil akhir dalam bentuk strategi yang telah diselaraskan (Stadelmann & Falconer, 2015). Selanjutnya, terdapat beragam metode yang dipakai oleh OI dalam implementasi programnya melalui *technical assistance*, yakni (1) *strategic partnership* atau kemitraan strategis melakukan kerja sama global dan *multi-stakeholder engagement* yang berguna sebagai instrumen dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang ada dalam sistem global; dan (2) *special fund* atau dana spesial diterapkan guna mendukung pemecahan masalah pembangunan secara menyeluruh dan mendalam dengan menggerakkan bantuan teknis (Wilson, 2007; Kay, 2016). Dalam bantuan teknis, implementasi kemitraan strategis memerlukan *multi-stakeholder engagement* dalam bentuk koalisi atau perserikatan yang mengacu pada inisiatif, aliansi, kemitraan yang melibatkan pemangku kebijakan (Peterson, 2013).

Aktivitas dalam pengembangan kapasitas yang berbentuk *technical assistance* meliputi banyak hal, melingkupi pengembangan institusi dan kapasitas, memberikan pelatihan, memberikan saran, informasi, data, mekanisme, dan proyek pemodelan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menyediakan konsultasi yang ditujukan untuk pemerintah, membantu dalam pelaksanaan program pembangunan, penyusunan rencana anggaran, dan lain-lain (Stadelmann & Falconer, 2015).

Problem solving yang dilakukan oleh OI harus menyesuaikan konteks situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Apabila dalam permasalahan terkait kemanusiaan, memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, proteksi kelompok rentan, dan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak. Pemecahan masalah kemudian diaplikasikan melalui berbagai proses pengambilan keputusan dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan, dimana cara atau solusi yang diimplementasikan harus sesuai untuk menghadapi berbagai hambatan di lapangan (Bradley, 2023).

Humanitarian assistance atau bantuan kemanusiaan diberikan oleh OI terhadap individu atau kelompok yang terkena dampak dari bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan mampu terjadi dalam banyak bentuk. Bencana kemanusiaan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti bencana alam, kesalahan teknologi, epidemi, *famine* atau kelaparan, konflik bersenjata, dan kekerasan di wilayah perkotaan. Bencana kemanusiaan memerlukan respon kemanusiaan dalam membantu permasalahan yang terjadi. Salah satu respon kemanusiaan yang dapat dilakukan adalah bantuan kemanusiaan (Bradley, 2023).

Bantuan kemanusiaan mempunyai tujuan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan mempertahankan martabat manusia (Bradley, 2023). Dalam bantuan kemanusiaan, penyusunan dan penggunaan bukti dalam kerangka kebijakan dan respon kemanusiaan merupakan hal yang krusial untuk menjadikan tindakan kemanusiaan lebih beretika, efektif, dan akuntabel (Clarke & Darcy, 2014). Lembaga operasional membutuhkan bukti yang bermutu tinggi agar dapat membuat keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dibutuhkan untuk

menentukan alokasi sumber daya, menetapkan sasaran yang akan dicapai, dan merancang program bantuan yang sesuai (Bradley, 2023).

Organisasi pendonor membutuhkan data atau bukti dalam menentukan berbagai aspek bantuan kemanusiaan. Organisasi pendonor membutuhkan data menetapkan wilayah mana yang memerlukan kebutuhan terbesar. Selain itu, data juga diperlukan untuk menentukan di wilayah mana mereka mampu memberikan peran terbaik untuk menurunkan atau memitigasi bantuan kemanusiaan, negara dan populasi mana yang memerlukan kebutuhan terbesar, jenis intervensi bantuan yang paling sesuai dengan konteks krisis, jangka waktu pemberian bantuan, serta aktor yang sesuai (Obrecht, 2017). Namun, organisasi tersebut kerap menghadapi rintangan saat pengumpulan bukti yang akan digunakan untuk menyusun dan menjaga gambaran yang tepat mengenai kebutuhan kemanusiaan (Bradley, 2023).

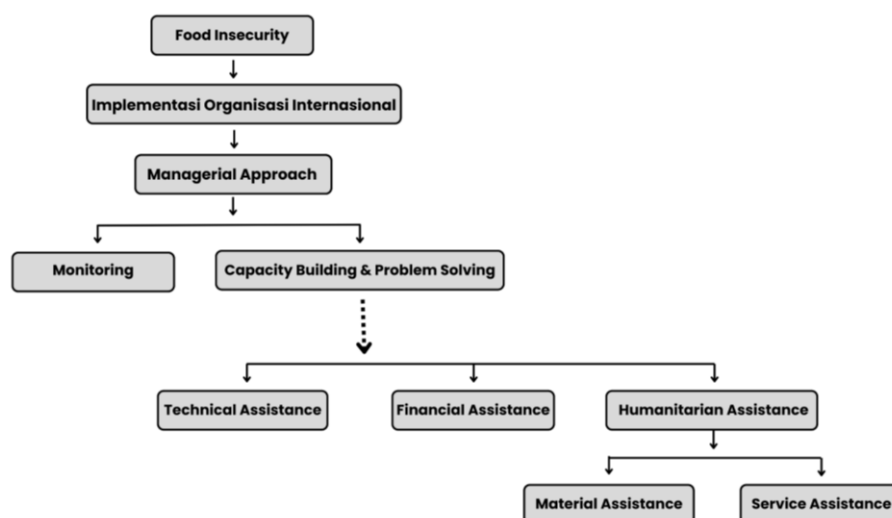
Dalam melihat apakah sasaran bantuan kemanusiaan memenuhi kebutuhan dari masyarakat, diperlukan pendekatan menggunakan metode kualitatif untuk memahami konteks ekonomi, sosial, dan politik lingkungan yang mempengaruhi implementasi program bantuan yang ada (Dijkzeul et al., 2013). Organisasi kemanusiaan melakukan penilaian terkait kebutuhan kemanusiaan secara konvensional. Penilaian kebutuhan tersebut dilakukan untuk memahami tingkat kerawanan, penyebab, dan dinamika sebuah krisis (Bradley, 2023).

Humanitarian assistance juga diatur dalam berbagai norma dan hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional yang mewajibkan akses untuk bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat dan konflik. Bantuan kemanusiaan terbagi menjadi dua jenis, yakni *material assistance* atau bantuan

material dan *service assistance* atau bantuan berupa layanan. Dalam penyediaan bantuan material, penyediaan bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok merupakan hal yang krusial untuk menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar kelompok yang terdampak krisis, seperti konflik bersenjata atau bencana alam (Bradley, 2023).

Bantuan material dapat berupa penyediaan makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Bantuan ini diberikan secara terorganisir dan sistematis agar dapat mencapai mereka yang sangat membutuhkan dalam waktu darurat. Selanjutnya, terdapat *service assistance* atau bantuan jasa, yang mencakup penyediaan layanan penting yang membantu memenuhi kebutuhan dasar dan keselamatan populasi terdampak. Bantuan jasa dapat berupa pemberian jasa kesehatan atau medis, jasa pendidikan, dan jasa psikososial atau sosial bagi kelompok rentan (Bradley, 2023).

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran
Sumber: Penulis

1.6 Argumentasi Utama

Implementasi program “The Sudan Country Strategic Plan” yang dilakukan oleh WFP untuk mengatasi kerawanan pangan di Sudan berupa dua hal, yakni upaya *monitoring* serta upaya *capacity building* dan *problem solving*. WFP melakukan *monitoring* dalam bidang ketahanan pangan secara tahunan dan setengah tahunan dengan memakai *Vulnerability Analysis and Mapping* (VAM), *the Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis* (CFSVA) and *Food Security Monitoring System* (FSMS). *Monitoring* tersebut menjadi rujukan utama untuk informasi keamanan pangan di Sudan, rujukan utama untuk IPC, dan menyediakan pedoman untuk penetapan sasaran geografis WFP. Selanjutnya, *capacity building* dan *problem solving* terbagi menjadi tiga jenis, yakni *technical assistance*, *financial assistance*, dan *humanitarian assistance*. *Technical assistance* diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam *Smallholder Farmer Support* (SHF), *Productive Safety Net* (PSN), *Sudan Emergency Production Programme* (SEWPP), penyediaan peralatan tenaga kerja, dan pengembangan di bidang infrastruktur,

Financial assistance diimplementasikan dalam bentuk bantuan uang tunai dan kupon melalui program *Cash-Based Transfers* (CBT) yang berupa bentuk fisik dan digital. Selanjutnya, *material assistance* diimplementasikan melalui *General Food Assistance* (GFA) yang berfokus pada *shock-affected people*, *Food Assistance for Assets* (FFA), dan *Nutrition-sensitive school feeding* yang mengalami penyesuaian berupa pemberian makanan yang dapat dibawa pulang

oleh anak-anak dan berubah nama menjadi *Emergency Nutrition Support* (ENS) akibat COVID-19, serta eskalasi konflik.

Service assistance diimplementasikan melalui pemberian dukungan gizi pencegahan dan pemulihan untuk anak dan *Pregnant and Lactating Women and Girls* (PLW/G), bekerjasama dengan beberapa aktor untuk membantu mengimplementasikan program bantuan dari WFP, bekerjasama dengan *United Nations Humanitarian Air Service* (UNHAS), dan menyediakan kebutuhan logistik, serta telekomunikasi untuk mendukung organisasi kemanusiaan dalam hal penyimpanan, konektivitas, dan koordinasi. Akan tetapi, dalam implementasi programnya, WFP menghadapi banyak tantangan disebabkan oleh situasi keamanan yang tidak stabil, bencana alam, dan berbagai tantangan lainnya. Untuk menangani berbagai tantangan di Sudan, WFP melakukan banyak penyesuaian program.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian atau gejala sosial dengan menyeluruh dan mendalam, seperti penelitian dengan kalimat tanya apa dan bagaimana. Dalam penelitian deskriptif, hanya satu variabel yang difokuskan dalam suatu penelitian (Purbantina & Perbawani, 2023). Penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi WFP melalui “The Sudan

Country Strategic Plan” dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan pada tahun 2019-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2019 sampai 2024. Periode tahun 2019 dipilih karena program "*The Sudan Country Strategic Plan*" dilaksanakan oleh WFP pada tahun tersebut untuk mengatasi kerawanan pangan yang sedang melanda Sudan. Program tersebut berlanjut dan berakhir pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2023 terjadi perang saudara di Sudan yang menewaskan banyak korban jiwa (Sputnik Africa, 2024). Peristiwa tersebut menjadi justifikasi untuk meneliti bagaimana implementasi WFP di Sudan sebagai wilayah yang rawan terjadi konflik dan peperangan antar etnis maupun saudara.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder tidak memperoleh data secara langsung, melainkan lewat penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersumber dari jurnal, buku, karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, dan berbagai berkas resmi secara *offline* atau *online* (Sugiyono, 2018). Peneliti mengumpulkan data melalui *website* resmi WFP dan FAO, laporan tahunan dari WFP, media massa, serta jurnal-jurnal terdahulu.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai teknik analisis data. Metode kualitatif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penelitian secara menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui dan memaparkan fenomena atau

gejala pada konteks alaminya. Pendekatan ini menyediakan tempat bagi berbagai kompleksitas yang tidak dapat selalu dihitung dengan angka, sehingga dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi lebih banyak dimensi dalam realita sosial (Sugiyono, 2018). Metode kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis implementasi WFP melalui “The Sudan Country Strategic Plan” dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan pada tahun 2019-2024.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian mengenai “Implementasi WFP Melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" dalam Mengatasi Kerawanan Pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024”, peneliti memastikan bahwa masing-masing bagian disusun secara terstruktur pada masalah yang diteliti agar tidak menyebabkan adanya data yang tidak relevan. Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN MONITORING DALAM *THE SUDAN COUNTRY STRATEGIC PLAN*

Dalam bab ini penulis membahas secara mendalam mengenai proses *monitoring* yang dilakukan melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" oleh WFP dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024.

BAB III PEMBAHASAN *CAPACITY BUILDING* DAN *PROBLEM SOLVING* DALAM *THE SUDAN COUNTRY STRATEGIC PLAN*

Dalam bab ini penulis membahas secara mendalam mengenai bentuk *capacity building* dan *problem solving* yang diterapkan melalui "*The Sudan Country Strategic Plan*" oleh WFP dalam mengatasi kerawanan pangan di Sudan Pada Tahun 2019-2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan akumulasi dari penelitian yang telah dilakukan dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.